PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

UNIT KERJA : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ERWIN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **449682**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 625.120.000

1. Tanah Seluas 262 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 68.120.000
2. Bangunan Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 255 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
5. Tanah Seluas 4320 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
6. Tanah Seluas 28.75 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 4834.5 m2 di KAB / KOTA SAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000
8. Tanah Seluas 277.5 m2 di KAB / KOTA SAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
9. Tanah Seluas 3240 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 6.000.000

1. MOTOR, HONDA NF125TR M/T SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 13.900.000

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	602.500
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	645.622.500
III.	HUTANG	Rp.	191.784.323
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	453.838.177

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.